

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia telah menunjukkan perkembangan yang menakjubkan, dengan berbagai peristiwa yang semakin mengeratkan kedekatan kedua negara. Inti dari hubungan ini adalah kerja sama ekonomi yang semakin solid, ditandai dengan lahirnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) pada tahun 2010. Perjanjian ini telah mengubah lanskap kerja sama, di mana Australia berkomitmen untuk mendukung Indonesia secara signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bagi Australia, kemitraan ini bukan hanya soal bantuan, tetapi juga kesempatan strategis untuk meningkatkan nilai tukar dan memperkuat posisinya sebagai negara sahabat di mata publik Indonesia. Hal ini berpotensi menarik minat masyarakat Indonesia untuk berkunjung atau melanjutkan studi di Australia, memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.

Selain dimensi ekonomi, IA-CEPA juga mengakomodasi aspek keamanan, dengan fokus pada ancaman teroris. Australia memandang perjanjian ini sebagai alat penting untuk memperkuat keamanan regional dan mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks ini, IA-CEPA diharapkan bisa memperkuat jaringan keamanan bersama, memberikan landasan bagi tindakan preventif yang lebih efektif. Di bidang maritim, kerja sama antara Indonesia dan Australia mengalami kemajuan yang signifikan. Kedua negara sepakat bahwa peningkatan hubungan di sektor maritim akan menjadi kunci dalam mencegah penetrasi kelompok teroris melalui jalur laut. Dengan pendekatan yang holistik ini, Australia dan Indonesia bekerja sama untuk mengamankan perairan mereka sekaligus memperkuat strategi keamanan regional.

Dampak dari IA-CEPA terhadap Indonesia cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan ekspor daging. Perjanjian ini diharapkan dapat memperluas peluang

bagi peternak dan produsen daging Indonesia untuk memasuki pasar Australia, yang merupakan pasar yang menguntungkan. Selain itu, kerja sama ini juga menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun, hubungan ini juga menghadapi tantangan, seperti perbedaan kebijakan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Meskipun demikian, komitmen kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan tetap menjadi kunci dalam mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberlanjutan kerja sama di masa depan. Secara keseluruhan, IA-CEPA tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kedua negara, dengan fokus pada saling menghormati dan kepentingan bersama dalam kerja sama ekonomi.

Kerja sama antara Polri dan AFP dalam menangani *cyber crime* merupakan respons strategis terhadap meningkatnya ancaman kejahatan siber yang bersifat transnasional. Sejak tahun 1977, kedua institusi telah menjalin kolaborasi yang terus berkembang, dengan fokus pada peningkatan kapasitas penegakan hukum di Indonesia. Salah satu inisiatif penting dalam kerja sama ini adalah pendirian *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum.

Kerja sama antara Polri dan *Australian Federal Police* (AFP) dalam penanganan *cyber crime* mencerminkan respon strategis terhadap meningkatnya ancaman kejahatan siber yang bersifat transnasional. Dalam era digital yang semakin maju, kejahatan siber telah menjadi masalah global yang memerlukan kolaborasi lintas negara untuk mengatasi kompleksitas dan dampaknya. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, kedua institusi penegak hukum ini telah berupaya untuk meningkatkan kerja sama mereka, terutama dalam konteks keamanan siber. Upaya dan Strategi kerja sama yang dijalankan antara Polri dan AFP adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pendidikan merupakan salah satu langkah kunci dalam kerjasama ini adalah program pelatihan yang diselenggarakan di *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan personel Polri dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Pelatihan mencakup berbagai aspek, seperti forensik digital, analisis intelijen, dan teknik investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan siber. Melalui pelatihan ini, Polri dapat mengadopsi praktik terbaik internasional dan memperkuat kapasitas internal dalam penanganan kejahatan siber.
2. Pembangunan Infrastruktur juga merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan cybercrime, Polri, dengan dukungan AFP, telah membangun *Cyber Crime Investigation Centre (CCIC)* dan *Cyber Crime Investigation Satellite Office (CCISO)*. Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan penyelidikan yang lebih cepat dan akurat terhadap kasus-kasus cybercrime. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan kemampuan investigasi, tetapi juga memberikan ruang bagi kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia.
3. Kerjasama antara Polri dan AFP juga melibatkan pertukaran informasi dan intelijen yang krusial dalam penanganan cybercrime. Melalui *Transnational Crime Coordination Centre (TNCC)*, kedua belah pihak dapat berbagi data, analisis, dan informasi terkait modus operandi kejahatan siber yang sedang berkembang. Pertukaran informasi ini memperkuat kemampuan kedua institusi untuk merespons ancaman secara cepat dan efektif, serta memfasilitasi penyelidikan lintas negara yang lebih terkoordinasi.

Polri dan AFP juga aktif dalam forum-forum internasional sebagai langkah untuk koordinasi jaringan kepolisian internasional, seperti pertemuan *Senior Officer Meeting (SOM)* dan konferensi internasional lainnya yang membahas isu-isu terkait cybercrime. Dalam forum ini, kedua institusi dapat berbagi pengalaman, strategi, dan kebijakan yang telah diterapkan, serta membahas tantangan yang dihadapi. Koordinasi

ini penting untuk menciptakan jaringan global dalam penanganan kejahatan siber dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil relevan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada.

Dampak dari kerja sama ini sangat signifikan. Polri kini memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengatasi kejahatan siber, yang tercermin dalam peningkatan jumlah kasus yang berhasil diinvestigasi dan dituntut. Selain itu, kerja sama ini juga berkontribusi pada peningkatan keamanan nasional Indonesia, yang pada gilirannya mendukung stabilitas regional dalam menghadapi kejahatan transnasional. Namun, tantangan tetap ada. Kecepatan perkembangan teknologi dan metode kejahatan siber yang terus berubah memerlukan adaptasi yang cepat dari kedua institusi. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk terus memperbarui teknologi dan pelatihan agar tetap relevan dengan ancaman yang ada. Polri juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kejahatan siber.

Secara keseluruhan kerja sama antara Polri dan AFP dalam penanganan *cybercrime* menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di era digital. Melalui pelatihan, pembangunan infrastruktur, pertukaran informasi, dan koordinasi internasional, kedua institusi telah berhasil meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kejahatan siber. Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada keamanan global, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat di kedua negara. Keberlanjutan dan penguatan kerja sama ini akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di masa depan.

Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang unik dalam menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman kejahatan siber. Kerja sama antara semua pemangku kepentingan seperti BSSN, Kementerian terkait dan lembaga penegak hukum lainnya ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam

dunia digital dan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang semakin kompleks. Selain itu lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam penanganan keamanan siber di Indonesia melalui pembuatan undang-undang, pengawasan kebijakan, penyusunan anggaran, fasilitasi kerja sama internasional, dan pendidikan publik. Keterlibatan DPR juga sangat penting dan cukup Sentral untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dan mendukung upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang marak terjadi.

